

MANAJEMEN PENCEGAHAN BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH

RAFI NAUFAL ARYANTO

NPP. 32.0463

*Asdaf Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik*

Email: rafipbg03@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Marzuki, SP, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *Hilly geographical conditions and high rainfall, two main factors that can trigger landslides. The phenomenon is further exacerbated by changes in land use, deforestation, and other anthropogenic factors, good landslide disaster prevention management is needed. Purpose:* *The purpose of this study was to analyze the management carried out by BPBD in efforts to prevent landslides. Method:* *The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. The theory used to see Landslide Disaster Prevention Management in Purbalingga Regency, Central Java Province is using the theory of George R. Terry, 2020 in his book Principles of Management dividing four basic management functions, namely Planning, Organizing, Actuating and Controlling. Results/Findings:* *The results of the study through 4 dimensions are in accordance with the opinion of George R. Terry, 2020, namely that landslide disaster prevention management in Purbalingga Regency is carried out in a structured and collaborative manner by BPBD, related agencies, and the community. Although the program has shown progress, the achievement of the main objective in minimizing damage and loss of life is still not optimal, so additional human resources and budget support are needed to increase the effectiveness of overall prevention efforts. Conclusion:* *Landslide disaster prevention management in Purbalingga Regency shows structured and collaborative efforts through planning that involves identifying vulnerable areas, organizing volunteer communities, implementing education and training activities, and controlling that includes routine evaluations, although still faced with challenges such as limited resources and economic conditions of the community that affect the effectiveness of prevention efforts.*

Keywords: *Management, Disaster Prevention, Landslide, BPBD, Purbalingga*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): *Kondisi geografis yang berbukit dan curah hujan yang tinggi, dua faktor utama yang dapat memicu terjadinya tanah longsor. Fenomena tersebut semakin diperburuk oleh perubahan penggunaan lahan, deforestasi, serta faktor-faktor antropogenik lainnya dibutuhkan manajemen pencegahan bencana tanah longsor yang baik. Tujuan:* *Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen yang dilakukan oleh BPBD dalam upaya pencegahan bencana tanah longsor. Metode:* *Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teori yang digunakan untuk melihat Manajemen Pencegahan Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah adalah menggunakan teori dari George R. Terry, 2020 dalam bukunya Prinsip Prinsip Manajemen membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu Planning*

(Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan) dan Controlling (Pengawasan). **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian melalui 4 dimensi sesuai dengan pendapat George R. Terry, 2020 yaitu Manajemen pencegahan bencana tanah longsor di Kabupaten Purbalingga dilakukan secara terstruktur dan kolaboratif oleh BPBD, instansi terkait, dan masyarakat. Meskipun program telah menunjukkan kemajuan, pencapaian tujuan utama dalam meminimalisir kerusakan dan korban jiwa masih belum optimal, sehingga diperlukan penambahan sumber daya manusia dan dukungan anggaran untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan secara keseluruhan. **Kesimpulan:** Manajemen pencegahan bencana tanah longsor di Kabupaten Purbalingga menunjukkan upaya terstruktur dan kolaboratif melalui perencanaan yang melibatkan identifikasi wilayah rawan, pengorganisasian komunitas relawan, pelaksanaan kegiatan edukasi dan pelatihan, serta pengendalian yang mencakup evaluasi rutin, meskipun masih dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kondisi ekonomi masyarakat yang mempengaruhi efektivitas upaya pencegahan.

Kata kunci: Manajemen, Pencegahan Bencana, Tanah Longsor, BPBD, Purbalingga

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat serta lingkungan hidup akibat bencana alam, bencana non-alam, dan bencana teknologi. Menurut Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI)-BNPB, lebih dari 25,487 kejadian bencana yang terjadi pada tahun 2015 hingga 2021, lebih dari 74,10% (78,890) adalah bencana hidrometeorologi, dan hanya sekitar 25,90% (6,604) adalah bencana geologi. Bencana dalam kelompok hidrometeorologi termasuk banjir, gelombang ekstrem, kebakaran lahan dan hutan, kekeringan, dan cuaca ekstrem. Sedangkan untuk kelompok bencana geologi yang sering terjadi berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan tanah longsor. Kabupaten Purbalingga, yang berada di Provinsi Jawa Tengah, adalah salah satu daerah yang juga rawan bencana tanah longsor. Kabupaten Purbalingga memiliki kondisi geografis yang berbukit dan curah hujan yang tinggi, dua faktor utama yang dapat memicu terjadinya tanah longsor. Fenomena tersebut semakin diperburuk oleh perubahan penggunaan lahan, deforestasi, serta faktor-faktor antropogenik lainnya. Tahun-tahun terakhir, Purbalingga mengalami beberapa kejadian tanah longsor yang mengakibatkan kerugian ekonomi dan sosial yang signifikan. Contohnya, longsor yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya mengakibatkan kerusakan infrastruktur jalan, rumah warga, dan lahan pertanian, serta menimbulkan ancaman bagi keselamatan penduduk. Di Kabupaten Purbalingga juga masih kurang dalam menghilangkan ancaman bencana tanah longsor. Masih banyak warga yang tinggal di tanah yang miring dikarenakan hanya itu lahan yang mereka punya dan belum dibangunnya tanggul di daerah rawan longsor untuk menampung tanah agar tidak menuju ke pemukiman penduduk yang akhirnya memakan korban. Berdasarkan kondisi geologis dan morfologis, Kabupaten Purbalingga, yang berada di kawasan perbukitan dengan kontur tanah yang kompleks dan lereng curam, memiliki risiko tinggi terhadap bencana tanah longsor, apalagi dengan adanya pembangunan rumah di lahan miring yang memperbesar potensi ancaman tersebut. Oleh karena itu, diperlukan manajemen pencegahan tanah longsor yang terintegrasi dengan pengkajian risiko bencana secara menyeluruh. Menurut (Murdhani, Wahyudi, & Mujahidin, 2024) Kajian risiko bencana (KRB) merupakan suatu pendekatan untuk menunjukkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat adanya potensi bencana yang mengancam. Pengkajian risiko ini mencakup identifikasi potensi bahaya, analisis kerentanan daerah, dan evaluasi dampak yang

mungkin terjadi, sehingga dapat disusun strategi pencegahan yang efektif untuk meminimalkan kerugian akibat longsor.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Manajemen pencegahan mencakup berbagai strategi dan tindakan untuk mencegah ancaman dan dampak dari tanah longsor. Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c meliputi: a. identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana; b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana; c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana; d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan e. penguatan ketahanan sosial masyarakat. Melihat kebutuhan akan pengelolaan risiko bencana yang efektif, studi tentang manajemen pencegahan bencana tanah longsor di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah menjadi sangat relevan. Apabila manajemen pencegahan diimplementasikan dengan baik maka akan menghilangkan ancaman. Meskipun telah diketahui bahwa faktor-faktor seperti deforestasi, pembangunan di lereng curam, dan kurangnya infrastruktur mitigasi seperti tanggul turut memperparah risiko, implementasi kebijakan dan tindakan preventif yang efektif masih belum maksimal. Terlihat dari masih banyaknya warga yang tinggal di daerah rawan longsor tanpa perlindungan yang memadai serta kejadian longsor yang terus berulang dan menimbulkan kerugian, menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi risiko yang ada dengan upaya manajerial yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pihak terkait.

1.3 Penelitian Terdahulu

1. Nisa, F. (2014). Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir, Puting Beliung, dan Tanah Longsor di Kabupaten Jombang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD dilakukan melalui tahapan respon, pemulihan, dan pengembangan.
2. Suwaryo, P. A. W., & Yuwono, P. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat dalam mitigasi bencana alam tanah longsor. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa uji korelasi menggunakan koefisien kontingensi menunjukkan bahwa ada hubungan antara umur ($p=0.001$), pendidikan ($p=0.008$) dan pekerjaan ($p=0.000$) terhadap tingkat pengetahuan. Hasil uji regresi logistik didapatkan umur ($RR=3.224$) merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkat pengetahuan warga masyarakat tentang mitigasi bencana alam tanah longsor. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi terkait mitigasi bencana dan peran masyarakat untuk meningkatkan manajemen bencana.
3. Rahman, A. Z. (2015). Kajian mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa program mitigasi yang dilaksanakan BPBD Banjarnegara meliputi Mitigasi Struktural dan Non Struktural telah terlaksana dengan baik. Misalnya, database bencana, pemasangan Early Warning System (EWS), informasi dan sosialisasi, pelatihan dan simulasi bencana.
4. Waladani, B., Suwaryo, P. A. W., & Suliyanti, A. (2022). Peningkatan Pengetahuan Mitigasi Bencana Dalam Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perubahan tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah edukasi, dimana rata-rata nilai pre test sebelum edukasi yaitu 35 dan setelah edukasi 90. Edukasi yang dilakukan

efektif meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana dalam pengurangan risiko bencana tanahlongsor.

5. Zulfa, V. A., & Widyasamratri, H. (2023). Analisis mitigasi bencana sebagai upaya manajemen risiko bencana tanah longsor. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa paper ini menunjukkan berbagai program mitigasi bencana tanah longsor baik secara struktural maupun non-struktural. Program-program tersebut disusun berdasarkan urgensi sesuai klasifikasi tingkat risiko tanah longsor.
6. Tictona, R. P., Marantika, S. B., Hendriawan, S. A., Daifullah, B., Krisnawan, G., & Kurniasih, Y. (2020). Manajemen Bencana Tanah Longsor di Desa Sambungrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa manajemen bencana dapat diawali dengan membentuk kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap akibat bencana alam, melakukan manajemen bencana dengan baik, sosialisasi dan simulasi kepada masyarakat di daerah rawan rencana, serta regulasi peraturan pemerintah terhadap manajemen bencana.
7. Buchari, R. A. (2020). Manajemen mitigasi bencana dengan kelembagaan masyarakat di daerah rawan bencana Kabupaten Garut Indonesia. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelatihan tanggap bencana belum optimal diberikan kesemua warga, dan masih sebatas kepada relawan yang dibentuk di masing-masing RT/RW, hal tersebut dikarenakan keterbatasan dukungan anggaran dari lembaga kebencanaan maupun dari pemerintah Desa dalam melakukan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat. selain itu lemahnya komunikasi antar pemerintah Desa yang menjadi Desa tangguh bencana.
8. Puri, D. P., & Khaerani, T. R. (2017). Strategi Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Purworejo. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa mitigasi bencana tanah oleh BPBD Kabupaten Purworejo belum maksimal. Dalam pelaksanaannya belum ada dokumen rencana kontinjensi bencana tanah longsor yang digunakan sebagai acuan tindakan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada belum memadai. Selain itu, rendahnya pengetahuan masyarakat dan sikap masyarakat yang apatis terhadap upaya mitigasi bencana tanah longsor menghambat pelaksanaan upaya mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Purworejo.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melaksanakan penelitian yang memiliki pendekatan berbeda dan belum pernah dilakukan dalam kajian-kajian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan kondisi terbaru di lapangan serta melibatkan informan yang lebih beragam dan luas untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif. Selain itu, celah penelitian (research gap) yang diangkat merupakan persoalan spesifik dan kontekstual yang hanya terjadi di lokasi penelitian, yaitu terkait dengan Manajemen Pencegahan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menjadikan penelitian ini relevan dan penting sebagai upaya memberikan kontribusi ilmiah dan solusi praktis bagi permasalahan kebencanaan di daerah tersebut.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam upaya pencegahan bencana tanah longsor, mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas manajemen pencegahan bencana, serta menilai sejauh mana keterlibatan masyarakat di daerah rawan bencana dalam upaya pencegahan tanah longsor. Ketiga tujuan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai strategi pencegahan yang telah dan seharusnya diterapkan di Kabupaten Purbalingga.

II. METODE

Penelitian adalah suatu proses untuk memperoleh pengetahuan baru dengan pendekatan sistematis yang melibatkan perencanaan dan intervensi yang tekun untuk penemuan atau interpretasi informasi yang baru diperoleh (Garg, 2016). Seorang peneliti diharapkan bekerja secara teliti dan akurat dalam setiap tahapan penelitian. Dalam hal ini, strategi memiliki peran penting sebagai teknik utama untuk mencapai tujuan serta menemukan solusi terhadap permasalahan yang dikaji (Arikunto, 2019:136). Terdapat tiga pendekatan umum dalam penelitian, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan pendekatan campuran (mixed methods), yang menggabungkan unsur dari keduanya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dianggap paling efektif untuk mengeksplorasi secara mendalam realitas sosial dan dinamika kompleks, khususnya dalam konteks Manajemen Pencegahan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Pendekatan ini dinilai relevan dalam menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat eksploratif dan interpretatif, mengingat keterlibatan berbagai aktor, proses, serta dinamika kelembagaan yang menyertainya. Nurdin dan Hartati (2019) menjelaskan bahwa metode kualitatif kerap disebut sebagai metode naturalistik karena dilaksanakan dalam kondisi alamiah. Metode ini juga dikenal sebagai metode etnografi, mengingat pada awalnya digunakan dalam studi antropologi budaya. Ciri khas dari pendekatan ini adalah penggunaan data yang bersifat deskriptif dan naratif. Crowther dan Lauesen (2017) menambahkan bahwa pendekatan kualitatif menggunakan bahasa alami, melibatkan sampel kecil yang dipilih secara purposif atau oportunistik, serta fokus pada individu, peristiwa, atau konteks tertentu. Hal ini menjadikannya sangat sesuai untuk eksplorasi mendalam terhadap kasus-kasus spesifik.

Pemilihan informan dilakukan secara purposif, dengan mempertimbangkan relevansi dan keterlibatan langsung dalam manajemen pencegahan bencana. Informan yang dipilih terdiri dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Sekretaris Pelaksana BPBD Kabupaten Purbalingga, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Purbalingga, serta petugas lapangan BPBD yang secara teknis terlibat dalam kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan. Selain itu, masyarakat yang terdampak langsung oleh bencana tanah longsor maupun yang tinggal di wilayah rawan bencana juga diikutsertakan sebagai informan untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif terkait efektivitas program dan kesiapsiagaan komunitas. Pemilihan informan tersebut dimaksudkan untuk menggali informasi secara holistik dari sisi kebijakan, pelaksanaan teknis, serta dampak dan persepsi dari pihak masyarakat. Dalam praktiknya, penelitian kualitatif membutuhkan beragam jenis data, mulai dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen, hingga foto atau data sekunder lainnya. Simangunsong (2017:192) menekankan bahwa fokus utama dari pendekatan ini adalah pencarian makna, sehingga makna dalam penelitian kualitatif sering kali bersifat subjektif dan jamak, tergantung pada pengalaman masing-masing partisipan.

Salah satu aspek penting dalam penelitian adalah penggunaan instrumen yang tepat untuk mengumpulkan data. Menurut Bhaskar dan Manjuladevi (2016), instrumen penelitian seperti formulir observasi, jadwal wawancara, dan kuesioner berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan informasi yang relevan. Pengembangan instrumen ini melalui empat tahap, yaitu:

1. Pengembangan konsep, di mana peneliti memahami kerangka teori dasar yang mendasari penelitian;
2. Penentuan dimensi konsep, yang mengacu pada pemetaan aspek-aspek utama dari konsep tersebut;

3. Pemilihan indikator, untuk mengukur masing-masing dimensi dengan alat ukur yang sesuai;
4. Penyusunan indeks, yaitu penggabungan indikator-indikator menjadi satu kesatuan ukuran komprehensif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai fokus penelitian yaitu manajemen pencegahan bencana tanah longsor di Kabupaten Purbalingga yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga berdasarkan teori yang digunakan, hambatan, dan juga upaya yang dilakukan dan kemudian disesuaikan dengan data yang diperoleh di lapangan baik berupa data primer, observasi, maupun hasil wawancara dengan informan penelitian.

3.1 Manajemen Pencegahan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Purbalingga

Dalam mengelola dan melaksanakan penelitian ini peneliti menggunakan teori Manajemen oleh George R. Terry (2020) yang diuraikan menjadi 4 (empat) dimensi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian serta setiap dimensi terbagi atas beberapa indikator yang telah ditentukan. Keempat dimensi yang digunakan bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan manajemen pencegahan bencana tanah longsor di Kabupaten Purbalingga.

3.1.1 Perencanaan

1. Rancangan dan Strategi untuk mencapai tujuan

Tabel Data Kerjasama Unsoed dengan BPBD Kabupaten Purbalingga

No.	Bentuk Kerja Sama	Instansi Terkait	Waktu	Deskripsi Kegiatan
1	Penandatanganan MoU	BPBD Purbalingga, Fakultas Teknik Unsoed	2015	Penerapan ilmu teknik sipil dan geologi untuk mitigasi bencana dan pemetaan kerawanan.
2	Kajian geologi di Kecamatan Karangmoncol	Teknik Geologi Unsoed	2024	Pemetaan zona rawan longsor berdasarkan analisis geologi dan lingkungan.
3	Permintaan kajian teknis tanah longsor di Desa Tlahab Lor, Karangreja	Teknik Geologi Unsoed	2023	Kajian penyebab longsor dan potensi risiko lanjutan.
4	Pengembangan sistem peringatan dini (Early Warning System) sederhana	Mahasiswa Fisika Unsoed	2021	Alat deteksi longsor murah yang bisa dirakit masyarakat, berbasis sirine.

Berdasarkan data diatas kerja sama antara BPBD Kabupaten Purbalingga dan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) merupakan langkah strategis dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana tanah longsor di wilayah Purbalingga. Kolaborasi ini dimulai secara resmi pada tahun 2015 melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BPBD dan Fakultas Teknik Unsoed, yang mencakup penerapan ilmu teknik sipil dan geologi dalam pengelolaan risiko bencana. Sejak saat itu, berbagai kegiatan telah dilaksanakan, seperti kajian geologi di wilayah rawan longsor seperti Kecamatan Karangmoncol dan Desa Tlahab Lor, pengembangan sistem

informasi kebencanaan berbasis teknologi GIS, serta inovasi sistem peringatan dini sederhana yang dirancang oleh mahasiswa Unsoed. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi, sehingga dapat meningkatkan kesiapsiagaan warga di daerah rawan bencana. Kolaborasi ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan tinggi dalam menciptakan solusi yang berbasis ilmiah dan aplikatif untuk mengurangi dampak bencana.

2. Analisis situasi Rencana aktivitas kerja organisasi

Proses menganalisis situasi bencana tanah longsor ini merupakan langkah awal yang penting dalam merancang rencana tindakan atau aktivitas kerja organisasi yang efektif dan responsif terhadap ancaman tanah longsor. Dengan pemahaman yang baik tentang faktor-faktor risiko dan kerentanan, serta titik-titik rawan yang diidentifikasi, langkah-langkah pencegahan dapat diarahkan dengan lebih efisien dan terukur.

3.1.2 Pengorganisasian

1. Hubungan Kerja Dalam Pelaksanaan Tugas

Dalam organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang menangani manajemen pencegahan tanah longsor, kerja sama yang kuat dan sinergis menjadi faktor utama dalam mencapai tujuan bersama untuk melindungi lingkungan serta masyarakat dari ancaman tanah longsor. Setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang terstruktur dalam upaya pencegahan serta respons terhadap tanah longsor. Keberhasilan sistem ini bergantung pada partisipasi aktif berbagai pihak, termasuk BPBD, TNI POLRI, pemerintah daerah, Dinas Kehutanan, masyarakat setempat, dan relawan, guna memastikan koordinasi yang efektif dan respons yang cepat terhadap potensi tanah longsor.

Setiap komunitas memiliki peran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dalam penanggulangan bencana. Beberapa komunitas berfokus pada pemetaan daerah rawan bencana untuk mengidentifikasi risiko yang ada di wilayah tertentu. Ada juga komunitas yang memberikan pelatihan tanggap darurat kepada masyarakat agar mereka lebih siap dalam menghadapi situasi darurat. Selain itu, komunitas relawan ini juga berperan dalam penyebaran informasi terkait kesiapsiagaan bencana, sehingga masyarakat dapat memahami langkah-langkah yang harus diambil sebelum bencana terjadi. Ketika bencana benar-benar terjadi, para relawan ini juga berperan dalam memberikan bantuan langsung kepada masyarakat terdampak, baik dalam bentuk evakuasi, pertolongan pertama, maupun distribusi bantuan logistik.

2. Susunan Organisasi

Struktur organisasi merupakan sistem hierarkis yang mengatur pembagian tugas, tanggung jawab, serta wewenang dalam suatu organisasi. Tujuan utama dari struktur ini adalah untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai tata kelola dan operasional organisasi. Dengan adanya struktur yang jelas, seluruh anggota organisasi dapat bekerja secara terkoordinasi guna mencapai tujuan bersama serta menjalankan fungsi organisasi secara optimal. Dalam konteks pencegahan tanah longsor, keberadaan struktur organisasi yang terorganisir dengan baik sangat krusial.

Struktur organisasi dalam penanganan bencana telah dirancang dengan cukup baik, di mana setiap lembaga atau unit memiliki peran dan tanggung jawab yang sudah ditetapkan. Meskipun secara umum koordinasi berjalan lancar, tetap diakui adanya kemungkinan kendala komunikasi yang bisa terjadi di lapangan. Ini menunjukkan bahwa sistem yang ada sudah kuat, namun masih memerlukan penyempurnaan, terutama dalam hal komunikasi dan sinergi antar lembaga.

3.1.3 Pelaksanaan

1. Semangat Kerja

Semangat kerja merupakan faktor krusial dalam pelaksanaan manajemen. Ketika anggota tim atau individu yang terlibat memiliki semangat kerja yang tinggi, mereka cenderung lebih termotivasi dan berdedikasi dalam menjalankan tugas dengan optimal. Semangat kerja yang kuat juga menciptakan energi positif serta meningkatkan keterlibatan, sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan dan menyelesaikan berbagai kendala yang muncul selama proses pelaksanaan.

Dengan menyoroti semangat kerja mereka yang tinggi, Mereka selalu siap siaga dan secara otomatis bergerak ke lokasi bencana untuk merespons situasi dengan cepat, menunjukkan komitmen terhadap keselamatan masyarakat. Selain itu, dukungan yang diberikan kepada petugas juga beragam dan berkelanjutan. Pelatihan berkala menjadi salah satu bentuk dukungan penting untuk meningkatkan kapasitas serta keterampilan mereka dalam menangani berbagai jenis bencana. Hal ini memastikan bahwa petugas selalu memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai untuk bertindak secara efektif. Di samping itu, pemerintah daerah juga turut berperan dalam mendukung operasional petugas dengan memberikan bantuan berupa peralatan penanggulangan bencana, logistik, serta bahan-bahan yang diperlukan dari UPD. Bantuan ini bertujuan untuk memperlancar tugas di lapangan, memastikan bahwa petugas memiliki sumber daya yang cukup dalam menghadapi dan mengelola bencana dengan baik.

2. Sikap Terhadap Tugas Yang Diberikan

Sikap terhadap tugas yang diberikan merupakan faktor psikologis yang berperan dalam menentukan bagaimana individu atau tim merespons, terlibat, dan menjalankan tanggung jawab mereka. Sikap ini mencakup berbagai aspek, seperti motivasi, komitmen, dan rasa tanggung jawab. Dalam manajemen, sikap terhadap tugas sangat berpengaruh karena dapat menentukan kualitas serta keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam konteks pencegahan bencana, sikap terhadap tugas mencerminkan kesediaan serta komitmen untuk menjalankan langkah-langkah pencegahan dengan penuh tanggung jawab, ketekunan, dan fokus. Hal ini juga mencakup pola pikir yang positif, semangat yang tinggi, serta kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan agar tugas dapat diselesaikan dengan optimal. Dengan sikap yang baik, individu maupun tim dapat bekerja lebih produktif, efisien, dan efektif dalam upaya pencegahan bencana.

3. Kualitas Kerja Dan Ketepatan Waktu

Kualitas kerja merupakan faktor krusial dalam pelaksanaan manajemen, terutama dalam upaya pencegahan bencana. Aspek ini mencakup standar tinggi dalam menjalankan tugas-tugas pencegahan, termasuk efisiensi, keandalan, ketepatan, serta kesinambungan dari langkah-langkah yang diterapkan. Selain itu, kualitas kerja juga mencerminkan kemampuan dalam merancang, mengimplementasikan, serta mengevaluasi strategi pencegahan secara optimal, serta memastikan respons yang cepat terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan yang muncul. Dengan menjaga kualitas kerja yang tinggi, manajemen pencegahan bencana dapat mencapai hasil yang maksimal dalam melindungi masyarakat dan lingkungan secara efektif serta efisien. Dalam praktiknya, kualitas kerja juga mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi serta menerapkan inovasi dan teknologi terbaru guna meningkatkan efektivitas serta efisiensi langkah-langkah pencegahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan tenaga kerja yang terampil, terlatih, serta penerapan praktik terbaik dalam pencegahan bencana.

3.1.4 Pengendalian

1. Evaluasi Kinerja Dan Ketertiban Saat Kerja

Evaluasi terhadap program pencegahan tanah longsor di Purbalingga dilakukan secara rutin setiap triwulan oleh bagian pemerintahan bersama seluruh UPD yang terlibat untuk meninjau efektivitas pelaksanaan, mengidentifikasi kendala, dan menentukan langkah perbaikan. Dalam pelaksanaannya, tingkat ketertiban sudah cukup baik karena adanya pemantauan melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta laporan indikator dan target kinerja bulanan yang memastikan disiplin dalam menjalankan tugas. Namun, kepatuhan masyarakat dalam pencegahan tanah longsor masih bersifat relatif, meskipun sosialisasi telah dilakukan, peringatan dini diberikan, dan alat Early Warning System (EWS) telah dipasang. Salah satu tantangan utama adalah kondisi ekonomi masyarakat, yang mempengaruhi kesiapan mereka dalam menerapkan langkah pencegahan seperti perbaikan struktur rumah atau relokasi dari daerah rawan longsor. Dengan demikian, meskipun evaluasi dan mekanisme pelaksanaan program telah berjalan baik, peningkatan kesadaran dan dukungan bagi masyarakat tetap diperlukan agar pencegahan tanah longsor dapat diterapkan lebih optimal.

2. Tercapainya Tujuan Organisasi

Tujuan utama dalam pencegahan bencana adalah menghilangkan risiko, terutama dalam menghindari kerusakan harta benda dan korban jiwa, namun hal ini belum tercapai karena beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan personil BPBD yang berdampak pada pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga informasi penting mengenai pencegahan bencana belum dapat disebarkan secara optimal. Selain itu, terbatasnya sumber daya untuk melakukan sosialisasi juga menjadi faktor yang menghambat pencapaian tujuan tersebut. Di samping itu, kondisi ekonomi masyarakat yang masih tinggi tingkat kemiskinannya turut mempengaruhi kemampuan dalam mencapai target pencegahan bencana. Sebagai solusi, BPBD mengharapkan adanya penambahan karyawan guna memperlancar dan meningkatkan proses edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat, sehingga diharapkan risiko bencana dapat diminimalisir secara lebih efektif.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pencegahan bencana tanah longsor di Kabupaten Purbalingga telah dilaksanakan melalui empat fungsi manajemen menurut George R. Terry, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Implementasi manajemen ini dilakukan secara terstruktur dan kolaboratif oleh BPBD, lembaga terkait, serta komunitas masyarakat. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih belum mendukung penuh penerapan langkah-langkah mitigasi.

Jika dibandingkan dengan temuan Nisa (2014), yang menekankan pada tahapan manajemen respons dan pemulihan pascabencana, penelitian ini memperluas fokus dengan menyentuh aspek preventif secara mendalam, terutama dalam konteks tanah longsor. Selain itu, berbeda dengan Suwaryo & Yuwono (2017) yang menyoroti rendahnya pengetahuan masyarakat sebagai faktor dominan dalam mitigasi bencana, penelitian ini menemukan bahwa selain faktor pengetahuan, keterbatasan ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap keterlibatan masyarakat dalam pencegahan. Temuan ini juga memperkuat hasil studi Rahman (2015) dan Zulfa & Widiasamratri (2023) yang menegaskan pentingnya kombinasi antara mitigasi struktural dan non-struktural, serta perlunya database kebencanaan dan sistem peringatan dini. Penelitian ini mendukung hal tersebut dengan menampilkan kerja sama antara BPBD dan Universitas Jenderal

Soedirman dalam pengembangan sistem deteksi dini dan edukasi masyarakat. Sementara itu, berbeda dengan Buchari (2020) yang menyoroti kelemahan dalam pemberdayaan masyarakat karena minimnya dukungan anggaran dan lemahnya komunikasi antar pemerintah desa, penelitian ini menunjukkan adanya struktur organisasi yang relatif baik namun tetap memiliki tantangan komunikasi di lapangan, sehingga membutuhkan penguatan lebih lanjut.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru melalui pendekatan manajerial berbasis fungsi George R. Terry yang menyeluruh dan kontekstual terhadap permasalahan di Purbalingga. Pendekatan ini mampu menggambarkan secara sistematis proses pencegahan bencana dan menjembatani kesenjangan antara perencanaan formal dengan realitas di lapangan.

IV. KESIMPULAN

Manajemen pencegahan bencana tanah longsor di Kabupaten Purbalingga dilakukan secara terstruktur dan kolaboratif oleh BPBD, instansi terkait, dan masyarakat, dengan fokus pada empat dimensi utama. Pertama, dalam dimensi perencanaan, BPBD melakukan identifikasi wilayah rawan, penyusunan strategi mitigasi, dan sosialisasi kepada masyarakat, serta menggandeng Universitas Jenderal Soedirman untuk pengembangan teknologi deteksi dini. Kedua, pengorganisasian menunjukkan sistem yang jelas dengan pembentukan forum dan 29 komunitas relawan yang aktif dalam edukasi dan evakuasi, meskipun masih ada tantangan komunikasi. Ketiga, pelaksanaan manajemen dilakukan secara sistematis melalui sosialisasi, pelatihan, dan pengembangan kapasitas, didukung oleh semangat kerja tinggi dari petugas dan komunitas relawan. Terakhir, pengendalian dan pengawasan dilakukan melalui pengaturan tata ruang dan evaluasi rutin, meskipun terdapat hambatan seperti keterbatasan sumber daya dan kondisi ekonomi masyarakat. Meskipun program telah menunjukkan kemajuan, pencapaian tujuan utama dalam meminimalisir kerusakan dan korban jiwa masih belum optimal, sehingga diperlukan penambahan sumber daya manusia dan dukungan anggaran untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan secara keseluruhan.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini menghadapi keterbatasan utama dalam hal waktu dan pendanaan, yang berpengaruh terhadap belum maksimalnya hasil yang dicapai.

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Penulis menyadari bahwa hasil temuan dalam penelitian ini masih bersifat awal, sehingga direkomendasikan untuk dilakukan studi lanjutan di lokasi yang sama dengan fokus pada Manajemen Pencegahan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penghargaan dan ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga beserta seluruh jajarannya atas kesempatan yang telah diberikan untuk melaksanakan penelitian ini. Penulis juga mengapresiasi semua pihak yang telah memberikan dukungan serta turut berkontribusi dalam kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.

VI. Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

Arikunto S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Bhaskar, S. B., & Manjuladevi, M. (2016). Methodology for research II. *Indian Journal of Anaesthesia*, 60(9), 646–651. <https://doi.org/10.4103/0019-5049.190620>
- Buchari, R. A. (2020). Manajemen mitigasi bencana dengan kelembagaan masyarakat di daerah rawan bencana Kabupaten Garut Indonesia. *Sawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa Dan Masyarakat*, 1(1), 1-7. [Manajemen Mitigasi Bencana dengan Kelembagaan Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Kabupaten Garut Indonesia | Buchari | Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat](#)
- Crowther, D., & Lauesen, L. M. (2017). Qualitative methods. *Handbook of Research Methods in Corporate Social Responsibility*, 225–229. <https://doi.org/10.4324/9781315672632-5>
- Garg, R. (2016). Methodology for research I. *Indian Journal of Anaesthesia*, 60(9), 640–645. <https://doi.org/10.4103/0019-5049.190619>
- Murdhani, L. A., Wahyudi, E., & Mujahidin. (2024). Earthquake Risk Analysis for Disaster Management and Mitigation in Central Lombok. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, 12(02), 5859–5865. <https://doi.org/10.18535/ijssrm/v12i02.em04>
- Nisa, F. (2014). Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir, Puting Beliung, dan Tanah Longsor di Kabupaten Jombang. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 2(2), 103-116. [View of Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir, Puting Beliung, dan Tanah Longsor di Kabupaten Jombang](#)
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Surabaya.
- Puri, D. P., & Khaerani, T. R. (2017). Strategi Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Purworejo. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 6(2), 51-65. [STRATEGI MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN PURWOREJO | Puri | Journal of Public Policy and Management Review](#)
- Rahman, A. Z. (2015). Kajian mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara. *Gema Publica*, 1(1), 1-14. [KAJIAN MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN BANJARNEGARA | Rahman | GEMA PUBLICA](#)
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. cet. 1. Bandung: Alfabeta
- Suwaryo, P. A. W., & Yuwono, P. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat dalam mitigasi bencana alam tanah longsor. *URECOL*, 305-314. [Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengetahuan Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Alam Tanah Longsor | URECOL](#)
- Terry, George R. 2020. *Prinsip Prinsip Manajemen*. Jakarta: BUMI AKSARA
- Tictona, R. P., Marantika, S. B., Hendriawan, S. A., Daifullah, B., Krisnawan, G., & Kurniasih, Y. (2020). Manajemen Bencana Tanah Longsor di Desa Sambungrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. *JMAN Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara*, 4(2), 16-25. [MANAJEMEN BENCANA TANAH LONGSOR DI DESA SAMBUNGREJO KECAMATAN GRABAG KABUPATEN MAGELANG | JMAN Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara](#)
- Waladani, B., Suwaryo, P. A. W., & Suliyanti, A. (2022). Peningkatan Pengetahuan Mitigasi Bencana Dalam Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor. *Jurnal Salingka Abdimas*, 2(2), 137-141. [PENINGKATAN PENGETAHUAN MITIGASI BENCANA](#)

[DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA TANAH LONGSOR | Waladani | Jurnal Salingka Abdimas](#)

Zulfa, V. A., & Widyasamratri, H. (2023). Analisis mitigasi bencana sebagai upaya manajemen risiko bencana tanah longsor. *Pondasi*, 28(1), 16-31. [PENINGKATAN PENGETAHUAN MITIGASI BENCANA DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA TANAH LONGSOR | Waladani | Jurnal Salingka Abdimas](#)

Peraturan

Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

